



Saatnya Berubah!

Muladno*

Pada April dan Oktober 2014, agenda limatahunan bangsa Indonesia akan digelar. Dimulai dengan pemilihan umum anggota legislatif dan dilanjutkan pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden RI. Terlepas dari partai apapun yang akan berkuasa dan siapapun yang akan menjadi RI-1 dan RI-2, persaingan antar bangsa di komunitas internasional akan semakin ketat. Para pemimpin bangsa dituntut bekerja semakin keras dan cerdas untuk mencukupi kebutuhan hidup dan memenuhi kesejahteraan warganya.

Terkait pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan kesejahteraan manusia, sumber daya alam Indonesia dan seluruh potensinya harus lebih banyak dikelola sendiri dalam rangka memperluas lapangan pekerjaan bagi generasi muda Indonesia. Di sisi lain peluang pekerjaan yang tersedia di luar negeri harus pula diirebut secara lebih banyak lagi.

Era globalisasi yang telah berlangsung selama ini harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Indonesia dan bukan hanya menjadi "good boy" bagi bangsa lain dengan menjadikan Indonesia sebagai pasar global saja. Para pemimpin bangsa harus menjadikan manusia Indonesia lebih cerdas dan lebih profesional agar mampu lebih bersaing di era keterbukaan ini. Termasuk di dalamnya adalah manusia profesional di bidang peternakan.

Dalam lima puluh tahun perjalanan fakultas peternakan di Indonesia, puluhan ribu sarjana peternakan telah dihasilkan. Namun demikian, tingkat pertumbuhan populasi ternak lokal tampaknya lebih lambat dari pertumbuhan populasi manusia di Indonesia. Populasi sapi perah dan sapi pedaging lokal belum dapat memenuhi sepenuhnya keperluan konsumen di dalam negeri. Populasi kerbau menurun drastis. Populasi kambing dan domba juga berkurang secara signifikan.

Kalau sekarang pelaku bisnis perunggasan hanya mengimpor bibit ayam ras pedaging dan ayam ras petelur maupun mengimpor bakalan sapi dan daging sapi dari Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, perlu di khawatirkan juga bahwa suatu saat nanti jang-jangan kita akan mengimpor kambing dan domba dari luar negeri. Jika ini terjadi, sangat tidak salah apabila ada pihak yang berpendapat para sarjana peternakan dan para pelaku di bidang peternakan memang tidak mau (atau tidak mampu) memanfaatkan kekayaan lokal secara optimal. Artinya, ternak lokal akan dibiarkan berkembang secara tradisional saja, tergantung dari para peternak kecil dengan skala kepemilikan 2-3 ekor sapi per peternak.

Oleh karena itu, harus ada perubahan besar dalam membangun peternakan di Indonesia. Perubahan dari nuansa "perdagangan" ke nuansa "peningkatan produktivitas" ternak. Dapat dikatakan, saat ini nuansa "perdagangan" lebih kuat daripada nuansa "peningkatan produktivitas" karena kebijakan pemerintah dalam pengembangan peternakan selama ini lebih banyak menguntungkan para pedagang daripada para peternak.

Bukti empiris menunjukkan, rancangan anggaran di Kementerian Pertanian untuk peternakan lebih banyak dialokasikan untuk pengadaan ternak daripada untuk peningkatan produktivitas ternak. Kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional juga menunjukkan anggaran penelitian di perguruan tinggi yang berorientasi ke pengembangan petani kecil (termasuk peternak) hanya kurang dari 3% per tahun (hasil evaluasi kinerja penelitian di LPPM IPB).

Yang juga menyedihkan, subsidi pendidikan untuk fakultas yang bergerak di sektor hulu (termasuk komoditas ternak) tidak diprioritaskan. Sebagai fakultas yang bertanggung jawab terhadap pemanfaatan sumber daya genetik ternak dan sumber daya alamnya seharusnya diberi subsidi jauh lebih besar daripada subsidi untuk fakultas yang mengembangkan barang dan jasa saja (atau disebut fakultas hilir). Fakultas yang disebut terakhir ini sangat laku di masyarakat sehingga mestinya menerima subsidi lebih rendah daripada fakultas hulu. Kebijakan Kementerian Riset dan Teknologi juga lebih berorientasi untuk mendorong penelitian ke arah yang lebih cepat menghasilkan produk riil dalam jangka pendek.

Disadari atau tidak, mungkin saja kebijakan pemerintah tersebut telah membuat pelaku bisnis, pengambil kebijakan, dan praktisi di bidang peternakan lebih banyak berpikir tentang strategi menghadapi serangan banjir impor dan tidak ada satupun yang berpikir menyusun strategi "menyerang" negara lain untuk mengisi pasar domestik mereka. Fenomena ini terjadi pada saat diskusi terbuka dalam forum Indonesia Poultry Club (IPC) di Hotel Santika TMI pada 19 Februari 2014 lalu.

Oleh karena itu, perubahan besar pembangunan di bidang peternakan harus dilakukan dengan membalik orientasi kebijakan pemerintah tersebut di atas. Anggaran Kementerian Pertanian untuk peternakan harus lebih banyak digunakan untuk meningkatkan kualitas peternak dan kualitas sarana usaha peternakannya; anggaran penelitian dari Kementerian Pendidikan Nasional di bidang peternakan harus diarahkan ke pemberdayaan peternak dan pemenuhan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peternak secara langsung; subsidi untuk fakultas peternakan sebagai salah satu penjaga dan pengawal keberadaan sumber daya alam termasuk ternak milik bangsa Indonesia harus lebih besar daripada subsidi untuk fakultas pengembang jasa dan barang. Anggaran Kementerian Riset dan Teknologi harus lebih banyak mendorong berkembangnya pusat-pusat unggulan di sentra peternakan yang tentu saja merupakan sentra komunitas peternak juga.

Semoga pemerintahan baru nanti tidak menjalankan kebijakan "business as usual" yang selama ini telah berjalan. Banyak terobosan yang perlu dibuat untuk menjadikan peternakan di Indonesia lebih mandiri dan peternaknya berdaulat. ●TROBOS

*Ketua Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan
Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor